



POLICY BRIEF - KERTAS KEBIJAKAN 2

Aksi Menuju
Pembangunan Berkelanjutan
dalam Masa Pandemi

**Memulihkan Pariwisata:
Pentingnya Kebijakan
dan Kemitraan di Masa
Pandemi**

Publikasi ini disusun sebagai bagian dari proyek Leadership Ownership and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE SDGs) yang dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) di 30 pemerintah daerah (16 Provinsi dan 14 Kota), bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan didukung secara finansial oleh Uni Eropa.

LOCALISE SDGs turut melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya di Indonesia seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI). Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.



Didukung oleh pendanaan hibah dari:



Didukung oleh:



Foto Sampul:

Pengrajin wayang kulit di kawasan alun-alun Kota Solo, Jawa Tengah

Fotografer: Bastian AS & Tim

Tim Peneliti:

Halida Nufaisa, S.Sos., Timoti Tirta M.A., dan Sarani Pitor Pakan, M.Sc

Penyunting Naskah:

Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, Rahmi Dwi Nydia, Imam Wisaya Surataruna, Aniessa Delima Sari, Rona Ikram Putri

Penerjemah:

Dian Rachmawati

Kontributor:

Indah Sri Wibi Nastiti, Teguh Ardhiwiratno (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia – APEKSI), Aniessa Delima Sari, Hendra Susila Adi, Vidya Kartika, Cemara Dinda, Rona Ikram Putri (UCLG ASPAC)

Pembahas riset: Dr. Andre Notohamijoyo, MSM (Koordinator Kajian Strategis, Direktorat Kajian Strategis, Kedeputusan Kebijakan Strategis - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Nova Erizon S.T., M.T (Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto).

Desainer Grafis:

Derick Prawira

Sekretariat UCLG ASPAC: Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9 Jakarta 10110, Indonesia, Tel. (62-21) 389 01801 Fax. (62-21) 389 01802, Email: secretariat@uclg-aspac.org, Situs: <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>

Memulihkan Pariwisata: Pentingnya Kebijakan dan Kemitraan di Masa Pandemi

Pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling awal oleh pandemi COVID-19, mengingat salah satu cara menekan kenaikan jumlah kasus adalah dengan membatasi mobilitas manusia. Secara global, sektor pariwisata diprediksi merugi 4.700 triliun rupiah per Juni 2020 (UNWTO, 2020). Jumlah pengangguran di seluruh dunia yang dihasilkan sektor industri ini diperkirakan mencapai 100,8 juta orang (Statista, 2020). Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan pada tengah tahun pertama 2020 diperkirakan turun drastis hingga 65 persen di seluruh dunia (UNWTO, 2020).

Di Indonesia, pandemi COVID-19 juga menghantam sektor pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara pada periode Januari sampai Agustus 2020 turun hingga 68,17 persen dibanding tahun 2019 (Kemenparekraf.go.id, 2020). Banyak pekerja pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja, dan banyak usaha sektor jasa pariwisata yang bangkrut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan sektor pariwisata ke depan adalah dalam rangka pemulihan. Pemulihan ekonomi pariwisata ini sejalan dengan pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sebuah komitmen global dan nasional yang berupaya menyejahterakan masyarakat, mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut:



Pemulihan ekonomi pariwisata berkaitan erat dengan tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan), dan tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Untuk mengeksplorasi langkah-langkah strategis pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memulihkan ekonomi pariwisata sekaligus memenuhi target TPB yang terkait, United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dan APEKSI, melalui program LOCALISE SDGs yang didanai oleh Uni Eropa, melakukan studi kasus di tiga wilayah di Indonesia. Wilayah yang diteliti adalah Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat; dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan prioritas berdasarkan analisis studi kasus. Rekomendasi kebijakan ini dapat diterapkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pariwisata di masa pandemi.



A Pariwisata harus hidup berdampingan dengan sektor lain

Rekomendasi Kebijakan

Secara umum, pandemi COVID-19 telah memberi sektor pariwisata kesempatan berimprovisasi. Krisis kesehatan global ini mengekspos betapa rentannya sektor pariwisata, dan bagaimana sektor ini dapat terpuruk seketika. Terkait kerentanan tersebut, Fletcher et al. (2020) menunjukkan betapa berbahayanya jika suatu tempat, komunitas, dan/atau individual bergantung sepenuhnya pada pariwisata. Hal ini terkait erat dengan paradigma pembangunan pariwisata. Studi kasus Nglanggeran membuktikan bahwa warga bertahan hidup seperti biasa selama pandemi karena kebanyakan dari mereka tak mengandalkan pariwisata sebagai satu-satunya mata pencaharian. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan industri kebutuhan primer lain perlu diutamakan, bukan hanya pariwisata. Studi kasus Sawahlunto juga mengekspos hal yang sama, bahwa sektor pertanian dan perkebunan pada akhirnya menyelamatkan ekonomi masyarakat. Di luar keduanya, narasi 'kembali bertani' atau 'kembali melaut' seperti yang muncul di Bali menemukan momentumnya di kala pandemi, di kala aktivitas pariwisata terhenti sampai waktu yang tak ditentukan.

Karena itu, para pemangku kepentingan perlu mendefinisikan ulang, atau bahkan merombak, paradigma pariwisata masing-masing daerah. Secara paradigmatis dan praktis, pariwisata perlu disesuaikan porsinya agar tidak terlalu mendominasi kehidupan suatu tempat atau komunitas. Selain itu, pariwisata harus mampu hidup berdampingan dengan sektor lain, sesuai aspek geografis dan sosio-kultural tiap daerah, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya.



B

Mengubah tipe wisata dan target wisatawan

Rekomendasi Kebijakan

Selain aspek pembangunan pariwisata, aspek perencanaan pariwisata perlu diperhatikan. Terkait dampak pandemi COVID-19, setidaknya ada tiga hal mendasar yang mempersulit pemulihan pariwisata, yaitu kurangnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan; syarat bepergian yang ketat (membawa surat sehat, hasil tes COVID-19, dll) yang mengurangi keinginan orang untuk bepergian; serta kondisi ekonomi masyarakat yang secara umum sedang menurun.

Maka, perencanaan pariwisata di masa pandemi perlu merespons tiga hal di atas. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan fokus ke tipe wisata alam atau wisata di ruang terbuka (*outdoor*). Wisata seperti ini lebih mampu mengurangi kerumunan dan risiko penyebaran virus (dibandingkan dengan aktivitas dalam ruangan yang lebih rentan penyebaran).

Penting juga untuk mengalihkan fokus perencanaan jangka pendek dan menengah pada wisatawan lokal dan domestik, karena pergerakan wisatawan internasional sangat dibatasi. Jenis wisata lokal/domestik dan staycation bisa diutamakan, sembari mengembalikan kepercayaan wisatawan internasional untuk datang sebagai perencanaan jangka panjang.



C Menerapkan protokol kesehatan secara permanen

Rekomendasi Kebijakan

Aspek perencanaan juga harus mencakup penerapan protokol kesehatan secara nyata, bukan sekadar slogan promosi wisata. Lebih penting lagi, studi ini merekomendasikan para pemangku kepentingan di sektor pariwisata (pemerintah, pelaku industri, wisatawan, masyarakat lokal, dsb) untuk menerapkan protokol kesehatan secara permanen, bahkan ketika pandemi COVID-19 benar-benar berakhir. Praktik *safe tourism* seharusnya bukan hanya dilakukan pada masa pandemi, mengingat kegiatan pariwisata harus mampu menjamin keamanan, kesehatan, dan kenyamanan bagi siapa pun yang terlibat.



D Mengalihkan arah kebijakan dan parameter pembangunan pariwisata

Rekomendasi Kebijakan

Sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Kemenparekraf, arah kebijakan pembangunan, perencanaan, dan promosi pariwisata dapat berpijak pada metode *storynomics*. Ini adalah pendekatan pariwisata yang mengedepankan narasi, konten kreatif, dan *living culture*. Metode ini juga menggunakan kekuatan budaya sebagai inti utama pengelolaan destinasi.

Hal ini telah dilakukan di beberapa daerah, salah satunya kecamatan Lasem, Jawa Tengah. Narasi yang diangkat dalam pariwisata Lasem adalah aspek budaya di produk unggulan mereka, yakni batik. Selain itu, narasi sejarah pada era kolonial juga kerap diangkat sebagai pendekatan pariwisata di Lasem.

Storynomics dan *storytelling* juga dipandang sebagai strategi untuk mengalihkan parameter pariwisata nasional yang selama ini masih terfokus kepada jumlah kunjungan turis, dan bukan kualitas wisata bagi wisatawan. *Storynomics* dan *storytelling*, bila diterapkan dengan tepat, akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Secara ekonomi, peningkatan kualitas pengalaman wisata akan berbanding lurus dengan peningkatan pengeluaran (*spending*) wisatawan. Kembali pada contoh di Kecamatan Lasem, wisatawan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti belajar membuat batik dan melakukan wisata sejarah di kota tua Lasem. Strategi *storynomics* dan *storytelling* ini adalah contoh riil sebagai pemantik bagi wisatawan untuk berimajinasi tentang budaya dan sejarah kecamatan Lasem.

Mengingat pandemi COVID-19 telah membatasi kedatangan wisatawan dan mengurangi jumlah kunjungan secara drastis, peralihan parameter dari 'kuantitas' menjadi 'kualitas' ini sangat masuk akal dan direkomendasikan. Harapannya, peralihan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan permanen, bukan hanya di masa pandemi.



E Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam mengembangkan destinasi wisata

Rekomendasi Kebijakan

Terkait dengan proses kemitraan dan pengambilan keputusan di sektor pariwisata, salah satu rekomendasi studi ini adalah soal reposisi peran pemerintah. Pemerintah perlu lebih berperan sebagai fasilitator yang menjembatani masyarakat lokal di destinasi pariwisata dengan sektor industri, investor swasta, media, akademisi, dan lainnya.

Reposisi peran pemerintah ini penting dalam rangka menciptakan proses pembangunan dan perencanaan pariwisata yang *bottom-up*. Artinya, sebuah destinasi atau atraksi tumbuh secara organik dari masyarakat lokal, bukan didesain secara top-down oleh pemangku kepentingan di atas, baik itu pemerintah atau akademisi. Pada studi ini, proses relasi antara Desa Nglanggeran dan Kabupaten Gunungkidul dapat dijadikan menjadi contoh. Destinasi wisata terbangun secara *bottom-up* dan diawali dengan inisiatif konservasi lingkungan, sehingga nilai dasar dari masyarakat serta kelestarian alam tetap terjaga.

Pemulihan pariwisata akan berlangsung baik bila setiap pemangku kepentingan pariwisata mengambil porsi yang sesuai, dan yang satu tidak lebih dominan dari yang lain. Hal ini terkait pula dengan dinamika kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan, yang sebaiknya mementingkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, alih-alih mengutamakan kepentingan politik atau ekonomi yang temporer.



F Memastikan kesejahteraan pekerja pariwisata

Rekomendasi Kebijakan

Pandemi COVID-19 telah memukul sektor industri pariwisata dengan keras, dan salah satu manifestasinya adalah jumlah pengangguran yang besar. Maka, pemulihan ekonomi pariwisata sangat terkait dengan pemulihan kesejahteraan pekerja pariwisata. Bentuknya bisa dengan bantuan langsung tunai, fasilitas untuk mencari pekerjaan baru, fasilitas untuk mendapat bantuan hukum, dan pengembangan kemampuan diri (*re-skilling* dan *up-skilling*).

Salah satu persoalan krusial terkait pekerja pariwisata adalah kurangnya data. Tidak ada data *real-time* untuk mengetahui secara pasti berapa dan siapa saja pelaku pariwisata yang terdampak (baik PHK, diberhentikan sementara, 'dirumahkan', dsb). Pengentasan masalah pekerja pariwisata dan usaha untuk memastikan kesejahteraan mereka perlu dilandasi oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pemulihan pariwisata harus mampu menjamin ketersediaan data yang terpercaya dan komprehensif, untuk mengantisipasi hal serupa di masa datang, baik itu data-data terkait pekerja pariwisata maupun data-data jenis lain. Terakhir, data pekerja pariwisata ini juga sebaiknya digunakan dalam proses pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan, tidak hanya untuk proses pelatihan dan sertifikasi yang bersifat sementara.

F

Meninjau program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

Rekomendasi Kebijakan

Inisiasi program pemerintah seperti promosi penjualan produk lokal #BanggaBuatanIndonesia saat ini patut diapresiasi, mengingat kerja sama dalam promosi ini sudah melibatkan berbagai sektor, kementerian, serta lembaga.

Meski begitu, ada beberapa program Kemenparekraf seperti Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, Environment* (CHSE)¹ untuk pelaku usaha yang perlu ditinjau lebih jauh. Ketepatangunaan dan relevansinya bagi implementasi pemulihan ekonomi pariwisata harus ditinjau, mengingat sertifikasi memakan banyak biaya dan bukanlah program yang singkat.

¹ Kemenparekraf. (2020). Siaran Pers: Wamenparekraf: Membangun Kepercayaan adalah kunci Percepatan Pemulihan Pariwisata. <https://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-wamenparekraf-membangun-kepercayaan-adalah-kunci-percepatan-pemulihan-pariwisata>

Daftar Pustaka

BAPPENAS. (2020). Panduan Kemitraan Multi Pihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Retrieved From: <https://www.infid.org/publication/read/panduan-kemitraan-multipihak-untuk-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>

Fletcher, R., Mas, I, M., Blazquez, S & Blanco-Romero, A. (2020). Tourism, Degrowth and COVID-19 Crisis. Retrieved from: <https://politicalecologynetwork.org/2020/03/24/tourism-degrowth-and-the-covid-19-crisis/>

Hakim, L. (2020). COVID-19 and the Moment to Evaluate Tourism Euphoria, Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 8(2). 119-123. doi: 10.21776/ub.jitode.2020.008.02.09

Kemendparekraf. (2020). Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan Tahun 2020. Retrieved from: <https://www.kemendparekraf.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020>

Kemendparekraf. (2020). Siaran Pers: Wamenparekraf: Membangun Kepercayaan adalah kunci Percepatan Pemulihan Pariwisata. Retrieved from: <https://www.kemendparekraf.go.id/post/siaran-pers-wamenparekraf-membangun-kepercayaan-adalah-kunci-percepatan-pemulihan-pariwisata>

Statista. (2020). Employment loss in the travel and tourism industry due to the coronavirus (COVID-19) Pandemic Worldwide in 2020, by Region. Retrieved from: <https://www.statista.com/statistics/1104835/coronavirus-travel-tourism-employment-loss/>

UNWTO. (2020). International Tourism and COVID-19. Retrieved from: <https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19>

UNWTO. (2020). International Tourist Numbers Down 65% in First Half of 2020, UNWTO Reports. Retrieved from: <https://www.unwto.org/news/international-tourist-numbers-down-65-in-first-half-of-2020-unwto-reports>



Sekretariat UCLG ASPAC

Balai Kota DKI Jakarta, Gedung H, Lantai 21
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Tel : +62 21 3890 1801, Fax : +62 21 3890 1802

Email: secretariat@uclg-aspac.org

Situs : <https://uclg-aspac.org> | <https://localisesdgs-indonesia.org>



Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab UCLG ASPAC dan APEKSI, dan bukan mencerminkan pendapat/pandangan Uni Eropa.